

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, T., dkk. 2013. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Gunadi. 2011. *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: MUC Consulting.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.
- _____. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/3/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- _____. 2014. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- _____. 2016. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
- Mahi, B. Raksaka., dkk. 2018. *Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesenambungan Fiskal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Octavia, S., dkk. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–8.
- PT Petrokimia Gresik. 2018. Petrokimia Gresik Annual Report 2018.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafiika Persada.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia (Buku 1 Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.